

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kazakhstan merupakan negara yang terletak di jantung Benua Eurasia (Library of Congress Kazakhstan, 2006). Kazakhstan adalah negara terbesar kedua di antara negara-negara *CIS (Commonwealth of Independent States)* yang berada di kawasan Asia Tengah dan menempati urutan kesembilan terluas di dunia dengan luas wilayah 2.717.000 km<sup>2</sup>. Kazakhstan berbatasan dengan Rusia di sebelah Barat laut dan Utara, China di sebelah Timur, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkemenistan di sebelah selatan, dan di Barat Daya berbatasan dengan Laut Kaspia (Advantour, 2001). Dengan demikian Kazakhstan merupakan negara yang terkurung daratan terbesar di dunia.

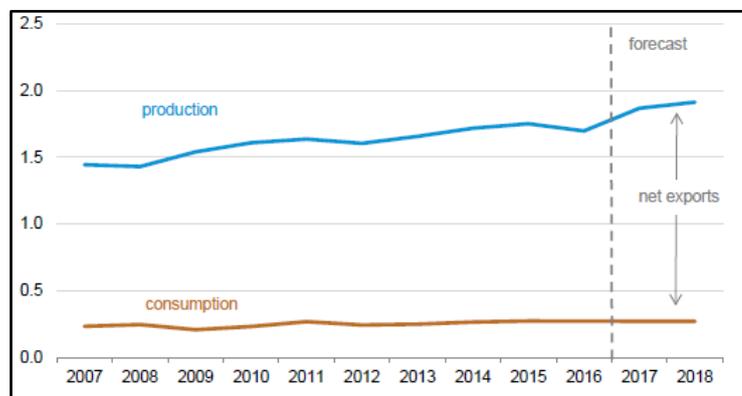
Kazakhstan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 16 Desember 1991, dengan nama resmi *Republic Of Kazakhstan* (Central Intelligence Agency, 2018). Secara historis Kazakhstan merupakan negara pecahan Kekaisaran Uni Soviet. Kazakhstan adalah negara yang terakhir merdeka diantara negara-negara pecahan USSR lainnya. Kemerdekaan ini mengisyaratkan keruntuhan dan hilangnya pengaruh Kekaisaran Uni Soviet di kawasan Asia Tengah. Nursultan Nazarbayev merupakan tokoh yang sangat penting dalam proses kemerdekaan Kazakhstan ini. Nazarbayev, yang menjadi sekretaris pertama Partai Komunis Kazakhstan (CPK) pada awal tahun 1989 dan terpilih sebagai Presiden Kazakhstan pertama ketika

merdeka pada tahun 1991 dan tetap dalam kekuatan yang tak terbantahkan sampai sekarang. (Bagdatova, 2017)

Republik Kazakhstan adalah negara kesatuan republik dengan bentuk pemerintahan presidensial. Dalam hal ini Kazakhstan menyatakan dirinya sebagai negara demokratis, sekuler, dan negara hukum yang menjunjung nilai-nilai sosial tertinggi yaitu individu, kehidupan, hak dan kebebasan (Parliament Of The Republic Of Kazakhstan, 1996).

Kazakhstan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, memiliki topografi yang beragam, mulai dari pegunungan Altay dan Tian Shan sampai Laut Kaspia yang ketinggiannya di bawah permukaan laut. Menurut Survei pada tahun 2017 populasi Kazakhstan mencapai 18.556.698 Jiwa. Kazakhstan juga dihuni oleh berbagai macam kelompok etnis yaitu Kazakh (Qazaq) dominan mencapai 63,1% kemudian ada etnis Rusia, Uzbek, Ukraina, Uighur Tatar, Jerman dan yang lainnya. Penduduk Kazakhstan mayoritas muslim, mencapai 70% (Central Intelligence Agency, 2018).

Gambar 1 1.1 Produksi Minyak Kazakhstan



Sumber : U.S Energy Information Administration

Menurut beberapa perkiraan, Kazakhstan memiliki uranium terbesar kedua, kromium, timah, dan seng. Kazakhstan juga memiliki cadangan mangan terbesar ketiga, cadangan tembaga terbesar ke lima, dan peringkat sepuluh besar untuk batu bara, besi, emas dan juga merupakan pengeksport berlian. Dalam *Oil & Gas Journal* (OGJ), Kazakhstan memiliki cadangan minyak mentah 30 miliar barel per Januari 2017. Hal ini menegaskan bahwa Kazakhstan berada di urutan terbesar kedua di Eurasia setelah Rusia, dan yang terbesar kelima belas di dunia, tepat di belakang Amerika Serikat (U.S Energy Information Administration, 2017).

Sebagai negara yang baru merdeka, keadaan ekonomi dan politik Kazakhstan belum stabil. Kazakhstan mengalami pergolakan yang panjang, ada banyak tantangan sekaligus ancaman yang di hadapi Kazakhstan. Melimpahnya Sumber daya alam dengan populasi yang relatif sedikit serta lokasi Kazakhstan yang berada di jalur perdagangan Internasional dan di persilangan benua Asia dan Eropa menambah daya tarik negara ini. Negara-negara *Super power* seperti Rusia, China dan Amerika Serikat siap kapan saja *mencaplok* wilayah negara ini.

Proses transformasi ekonomi dan politik Kazakhstan dimulai sejak merdeka atau setelah jatuhnya Uni Soviet yaitu pada bulan Desember 1991. Dalam Bidang ekonomi Terjadi reformasi yang masif, reformasi ini bertujuan untuk merubah ekonomi komando dan menciptakan ekonomi pasar. Dalam Dmitri Men (Dmitri Men, 2013) menyebutkan ada empat tahap dalam transformasi ekonomi Kazakhstan.

Ekonomi Kazakhstan mengalami perubahan dari awal merdeka, reformasi ini diawali dari tahap pertama yaitu periode 1992-1993. Keruntuhan Uni Soviet memberikan dampak yang signifikan di sektor ekonomi nasional yang ditandai dengan penurunan produksi produk industri dan pertanian. Hal yang paling mendasar dalam periode ini adalah pengenalan mata uang nasional Kazakhstan yaitu *Tenge*. Kemudian disertai dengan transformasi kepemilikan melalui privatisasi, peningkatan stabilitas keuangan disertai dengan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu *hiperinflasi*. Di era pasca-Soviet, Kazakhstan masih terkait erat dengan Rusia karena jalur pasokan energi, pertahanan nasional, dan pentingnya teknologi Rusia dalam perekonomian Kazakhstan.

Memasuki tahap kedua yaitu periode 1993-1997. Tahap ini ditandai dengan penciptaan kerangka hukum untuk mengatur hubungan di bidang perpajakan, fiskal dan sektor perbankan, perdagangan luar negeri, pengembangan pasar dan infrastruktur. Hasil utama dari tahap kedua reformasi berasal dari kebijakan ekonomi fundamental baru, yang menciptakan transformasi ekonomi dari komando menjadi ekonomi pasar. Pada tahap ini terjadi liberalisasi ekonomi.

Tahap selanjutnya adalah periode 1997-2000. Yang sangat penting adalah pengambilan keputusan tentang pembentukan Dana Nasional Republik Kazakhstan, yang memungkinkan mengurangi negara ketergantungan pada perubahan yang merugikan dalam situasi harga pada pasar dunia.

Tahap keempat dari ekonomi Kazakhstan telah dimulai sejak 2003. Hal-hal penting dalam periode ini adalah menguatnya sektor swasta, meningkatkan peraturan pajak, investasi dan perdagangan memungkinkan mereka untuk menyediakan *free Trade* dan modal. Ekonomi Kazakhstan telah sepenuhnya matang untuk lebih jauh modernisasi. Nazarbayev juga berusaha lebih dekat dengan Barat, dengan penemuan ladang minyak baru yang besar hal ini lah yang menarik para investor internasional dan membuat perekonomian Kazakhstan meningkat pesat jauh diatas negara-negara Asia Tengah lainnya. Pada tahap ini, ada pertumbuhan yang nyata PDB, produksi industri, investasi meningkat.

Sementara dalam bidang politik, Kazakhstan belum stabil. Cita-cita demokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang Demokrasi belum terwujud pada periode ini. Adapun demokrasi yang dipahami sebagai kondisi ketika kekuasaan seimbang dan terkendali. Suara oposisi harus diijinkan dan harus ada kebebasan dari media (The U.S Chamber of Commerce and The American Chamber of Commerce in Kazakhstan, 2005)

Para pengamat Barat mengatakan bahawa pada pertengahan 1990-an yaitu diantara 1994-1995 disebut sebagai awal transformasi demokrasi. Pada periode ini demokrasi belum berjalan, Presiden masih mendominasi pemerintahan dan pengambilan keputusan, puncaknya adalah pada musim semi tahun 1995 Presiden Nazarbayev melakukan pemecatan parlemen. Kemudian Nazarbayev juga menggunakan referendum Mei untuk memperpanjang masa jabatannya. Bahkan sampai pada tahun 1995, negara Kazakhstan belum dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis ini terkait dengan dominasi presiden yang sangat tinggi

dan kurangnya kebebasan berpendapat dan pers. Namun, Kondisi demokrasi dalam politik domestik Kazakhstan tahun ini tidak mengancam stabilitas negara. Konstitusi memberikan semua warga negara hak-hak sipil yang sama, dan mayoritas besar menerima konstitusi pada prinsipnya. (Bertelsmann Transformation Index, 2009)

Krisis keuangan 1998 di Rusia memiliki efek tidak langsung pada politik di Kazakhstan. Untuk mengantisipasi dampak buruk krisis ini yang berdampak pada hilangnya dukungan terhadap presiden, maka pada Oktober 1998 parlemen memutuskan pemilihan presiden pada Januari 1999. Dalam pemilihan ini, Nazarbayev memenangkan pemilihan dengan perolehan suara lebih dari 80%. Dominasi Nazarbayev semakin menguat pada periode selanjutnya dimana Nazarbayev telah menggunakan kebijakan kepegawaian sebagai sarana utamanya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menempatkan anggota keluarganya di posisi-posisi kunci. Keadaan ini menimbulkan kritik dari pihak oposisi. (Dmitri Men, 2013)

Pihak oposisi ini umumnya dimotivasi oleh alasan pribadi individu, baik platform partai maupun masalah demokratis yang memainkan peran. Setelah perjuangan kekuasaan dengan menantu Nazarbayev, Rached Aliev, pejabat tinggi pemerintah dan kepentingan bisnis terkemuka menentang presiden untuk pertama kalinya pada akhir tahun 2001. Nazarbayev menjadi gugup dan memecat pejabat pemerintah. Iklim politik domestik telah memburuk secara signifikan sejak saat itu. Represi terhadap orang-orang dengan pendapat yang berbeda telah meningkat, dan tekanan pada pers Kazakhstan yang terbatas semakin kuat.

Memasuki tahun-tahun selanjutnya, keadaan tidak jauh berbeda struktur politik yang stabil tetapi kaku, populasi yang kecil dan terbagi secara etnis, dan posisi geografis yang secara komersial tidak menguntungkan. Hukum disahkan untuk melindungi dan mengembangkan budaya dan bahasa Kazakh. Penduduk Kazakhstan berbahasa Kazakh dan sementara bahasa Rusia disebut sebagai bahasa hubungan internasional dan perdagangan. Terlebih lokasi negara Kazakshan yang terkurung daratan mengharuskan Kazakhstan untuk Bekerjasama dengan negara lain.

Seiring meningkatnya kesejahteraan ekonomi, Nazarbayev juga menerapkan kebijakan-kebijakan politik terpusat. Masalah keamanan kawasan menjadi isu penting yang tidak bisa diabaikan. Didorong oleh menguatnya isu *terrorism, sparatism dan extrimsism* di Asia Tengah, dua negara *superpower* yang sudah sejak lama menamkan pengaruhnya di kawasan ini yaitu China, Rusia mulai gusar akan datang kekuatan baru lainnya seperti Amerika Serikat. Dengan semangat untuk menjaga stabilitas kawasan maka munculnya suatu organisasi Internasional ditengah krisis di negara-negara yang baru merdeka ini yaitu *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*

*Shanghai Cooperation Organization (SCO)* merupakan Organisasi Internasional permanen antar pemerintah. SCO semula bernama *Shanghai Five (S5)* yang berdiri pada tahun 1996, yang beranggotakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Kazakhstan, Kyrgystan dan Tajikistan. *Shanghai Five* merupakan sebuah forum yang membahas mengenai *Confidence Building Measures (CBM)* dan masalah perbatasan kawasan RRT dengan Negara-negara bekas Uni Soviet

yang menghasilkan perjanjian-perjanjian seperti pengurangan angkatan bersenjata dan diberlakukannya zona bebas militer di perbatasan, pertukaran informasi militer, memberantas separatisme, terorisme internasional, serta ekstrimisme keagamaan khususnya Islam fundamentalis. (Sarah, n.d)

Melanjutkan dari *Shanghai Five Spiri* pembentukan SCO diumumkan pada tanggal 15 Juni 2001 di Shanghai (Cina) oleh Republik Kazakhstan, Republik Rakyat Cina, Republik Kyrgyz, Federasi Rusia, Republik Tajikistan, dan Republik Uzbekistan. (Shanghai Cooperation Organization, 2018) Piagam Organisasi Kerja Sama SCO ditandatangani pada Juni 2002, dan mulai berlaku pada 19 September 2003. Ini adalah dokumen hukum dasar yang menguraikan tujuan dan prinsip organisasi, serta struktur dan kegiatan inti dalam tubuh SCO (The Shanghai Cooperation Organisation, 2017)

SCO menjalankan kebijakan internalnya berdasarkan prinsip-prinsip saling percaya, saling menguntungkan, persamaan, konsultasi timbal balik, menghormati keragaman budaya, dan keinginan untuk pembangunan bersama, sementara kebijakan eksternalnya dilakukan sesuai dengan prinsip *non-alignment* atau non blok , tidak menargetkan negara ketiga, dan keterbukaan.

Saat ini SCO memiliki 18 negara anggota yang dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah Negara anggota (*member states*), SCO memiliki delapan negara anggota, yaitu Republik India, Republik Kazakhstan, Republik Rakyat Cina, Republik Kyrgyz, Republik Islam Pakistan, Federasi Rusia, Republik Tajikistan, dan Republik Uzbekistan. Kategori kedua adalah Negara observer (*observer states*), SCO memiliki empat negara pengamat, yaitu

Republik Islam Afghanistan, Republik Belarus, Republik Islam Iran dan Republik Mongolia Kemudian kategori yang terakhir adalah partner dialog (*dialogue partners*), SCO memiliki enam mitra dialog, yaitu Republik Azerbaijan, Republik Armenia, Kerajaan Kamboja, Republik Demokratik Federal Nepal, Republik Turki, dan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka (The Shanghai Cooperation Organisation, 2017)

Proses pembentukan SCO mengalami perkembangan positif kearah *regionalism* ekonomi mulai tercipta di kalangan Negara-negara Asia Tengah, Cina dan Rusia yang berlandaskan kepada saling percaya, dan bekerjasama. Kerjasama Ekonomi merupakan salah satu sektor kerjasama utama bagi SCO, meskipun pada awalnya terkesan tertutupi oleh begitu tingginya level kerjasama dalam sektor keamanan. Hal ini terlihat dengan dirumuskan kerangka acuan bagi peningkatan status kerjasama SCO *Outline on The Multi-Lateral Economic and Trade Cooperation among the Member States of Shanghai Cooperation Organization* yang disepakati oleh Negara-negara anggota SCO pada pertemuan tingkat Perdana Menteri di Bishkek, Kyrgyzstan pada tahun 2004 lalu. (Ridarta, 2018, pp. 2-3)

Dalam Pertemuan Kepala Pemerintahan tingkat Perdana Menteri dari enam negara telah membahas isu-isu penguatan mekanisme SCO dan mengintensifkan kerja sama di bidang perdagangan, ekonomi dan lainnya dan telah mencapai saling pengertian yang luas. Adapun hasil dalam pertemuan tersebut diantaranya berbunyi.

“In order to develop trade and economic cooperation among the SCO member states and improve investment climate on the basis

of mutual benefit and equality, the heads of government adopted the Program of Multilateral Trade and Economic Cooperation of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization. It has been agreed that, by January 1, 2004, the SCO member states will prepare and submit to the Russian side proposals for the draft Measures in support of the Program implementation.” (Shanghai Cooperation Organization, 2003)

Hasil kerjasama tersebut menjelaskan bahwa telah disepakati bahwa, pada tanggal 1 Januari 2004, negara-negara anggota SCO akan mempersiapkan dan menyerahkan proposal pihak Rusia untuk rancangan Langkah-langkah untuk mendukung pelaksanaan program dalam rangka mengembangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi di antara negara-negara anggota SCO dan meningkatkan iklim investasi atas dasar saling menguntungkan dan kesetaraan, para kepala pemerintahan mengadopsi Program Perdagangan Multilateral dan Kerjasama Ekonomi Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Shanghai.

Kazakhstan bergabung dengan SCO sejak SCO terbentuk. Hubungan Kazakhstan dan SCO sangat erat. Peran Kazakhstan dalam keberlangsungan SCO sangat penting. Berbagai program yang menghasilkan perjanjian dan kesepakatan dalam SCO banyak yang terkait langsung dengan kondisi domestik Kazakhstan dan berdampak langsung pada kebijakan dalam dan luar negeri Kazakhstan.

Kazakhstan memiliki daya tarik yang luar biasa baik dari segi Geografis maupun kekayaan Sumber Daya Alamnya. Letaknya yang berada di Kawasan Asia Tengah, sebagaimana diketahui Kawasan Asia Tengah adalah kawasan yang

sangat strategis secara geopolitik di dunia. Negara-negara super Power berebut dalam menancapkan pengaruhnya di Kawasan ini. Selain sebagai lumbung energi dan penghasil kekayaan alam lain, kawasan Asia Tengah dapat secara geografis menjadi jembatan antara Asia Timur dan Timur tengah. Sudah pasti dengan begini Asia Tengah menjadi jalur minyak yang potensial untuk kawasan-kawasan di sekitarnya. Kawasan Asia Tengah lagi pula dapat dikatakan telah ‘ditinggalkan pemiliknya’ sejak keruntuhan negara Uni Soviet yang sebelumnya berkuasa di kawasan tersebut. Hal ini menjadikan kawasan Asia Tengah menjadi kawasan yang sangat diperebutkan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia.

Kebijakan luar negeri Kazakhstan selalu terbuka dan kooperatif. Itulah mengapa Kazakhstan terlibat dalam dialog aktif dengan semua tetangganya dan internasional. Kazakhstan memiliki hubungan yang stabil dengan semua negara tetangganya . Kazakhstan juga merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa , Dewan Eropa-Atlantik Kemitraan dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI ) dan juga tergabung dalam *Partnership for Program Peace* (NATO). (The U.S Chamber of Commerce and The American Chamber of Commerce in Kazakhstan, 2005)

Kehadiran Kazakhsatn dalam tubuh SCO menjadi hal menarik untuk diperbincangkan, pasalnya negara terluas diAsia Tengah memiliki andil yang cukup tinggi dalam keberhasilan program-program SCO. Selama sepuluh tahun terakhir, Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) telah menjadi pemain kunci bagi kedudukan internasional Kazakhstan dan proses geopolitik di Asia Tengah secara

umum (Central Asia's Affairs, 2006). Melihat perannya yang sedemikian tinggi lalu bagaimana dengan hubungan timbal baliknya terhadap ekonomi dan politik di Kazakhstan ini yang mendorong penulis untuk meneliti. Penelitian ini diberi judul **“Dampak Shanghai Cooperation Organization (SCO) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Politik Kazakhstan Pada Tahun 2008-2017”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah **“ Bagaimana Dampak Shanghai Cooperation Organization (SCO) Dalam Pertumbuhan ekonomi dan Stabilitas Politik Kazakkstan Pada Tahun 2008-2017?**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pondasi utama yaitu :

### **Teori Neoliberal Institusionalisme**

Neoliberalisme institusional ini meruapkan salah satu varian dari liberalisme. Robert Keohane dan Josep Nye adalah dua pemikir yang memberikan pengaruh yang besar dalam pengembangan teori ini. Neoliberalisme Institusional menyatakan bahwa institusi internasional menolong memajukan kerjasama di antara negara-negara. (Robert Keohane, 2005)

Menurut neoliberal Institusionalisme sifat dasar interaksi antar negara yakni kompetitif dan kadang-kadang terjadi konflik tetapi lebih sering bersifat kerjasama pada bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

Kerjasama negara-negara dalam sistem internasional yang anarki dalam wadah insitusi internasional menjadi kajian pokok dari teori ini. Kaum neoliberal memandang adanya sebuah institusi ditujukan sebagai mediator atau perantara untuk mencapai kerjasama diantara aktor dalam sistem internasional. Karena kompleksitas dan intensitas hubungan antara negara yang semakin tinggi, maka berbagai permasalahanpun kerap kali mengiringinya. Hal itu ditambah lagi dengan kepentingan yang beragam dari setiap negara memungkinkan terjadinya persinggungan kepentingan yang bisa berujung pada konflik. Oleh karena itulah peran sebuah institusi sangat penting dalam rangka menjamin kerjasama, atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan.

Dalam (Keohane R. , 1989) menyatakan :

“Berusaha Untuk menghilangkan potensi-potensi konflik melalui institusi sebagai instrumen utamanya dengan negara sebagai aktor utama. Institusi secara umum didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan praktek-praktek yang menentukan peran, memaksakan tindakan, dan membentuk pengharapan” (Keohane R. O., 1986)

Menurut kaum liberal institusi internasional adalah suatu organisasi internasional, seperti NATO atau Uni Eropa atau merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu, seperti penerbangan atau pengapalan. Seperangkat aturan ini juga dapat disebut “rejim”, rejim perdagangan, sebagai contoh, dibentuk terutama oleh *World Trade Organization* (WTO). (Robert Keohane, 2005)

Perspektif neoliberal institusionalisme membantu menjelaskan bagaimana peranan dari sebuah institusi sebagai wadah untuk menjalin kerjasama. Mengenai Institusi ini, kaum neoliberal institusionalisme percaya akan asumsi rasionalitas. Sehingga Negara sebagai aktor utama yang rasional akan lebih memilih bekerjasama daripada berkonflik, karena dengan kerjasama mereka saling mendapatkan keuntungan. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka akan tercipta interdependensi yang merupakan refleksi dari perdamaian.

Aktor rasional (individu maupun negara) diasumsikan bersifat *atomistic*, mementingkan diri sendiri dan nasional. Aktor akan memmentingkan diri mereka sendiri untuk memenuhi kepentingannya dan ia juga rasional yang mampu membangun cara yang paling efektif dan efisien untuk mewujudkan kepentingan mereka dalam kendala yang mereka hadapi. Dikarenakan aktor rasional itu bersifat *rasional Seking*, maka ia akan melakukan kalkulasi untung dan rugi dalam mengambil suatu kebijakan yang mendapatkan keuntungan yang maksimal

Neoliberalisme yang menjadi induk teori dari neoliberalisme institusionalisme memiliki asumsi dan preposisi yang mendasar. Ada enam asumsi dasar yang menjadi fondasi dari neoliberalisme, yakni *pertama*, neoliberalisme menyakini bahwa Negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional. *Kedua*, Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dalam pemahaman neoliberal adalah sebagai aktor rasional. *Ketiga*, politik internasional sering kali ditandai oleh masalah aksi bersama (*collective action problem*). *Keempat*, politik internasional secara substansi ditentukan oleh struktur kepentingan negara. *Kelima*, politik

internasional juga dipengaruhi oleh karakter anarki dari sistem internasional. *Keenam*, dampak dari struktur kepentingan negara dan anarki dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, jumlah aktor, institusi internasional dan tingkat ketergantungan.

Secara lebih spesifik Robert Keohane mendefinisikan Institusi internasional sebagai seperangkat peraturan (formal dan informal) yang saling berhubungan dan berkesinambungan yang akan menjelaskan pola tingkahlaku negara, aktivitas yang memaksa, dan bentuk-bentuk harapan. Institusi internasional sebagaimana penjelasan diatas dapat diartikan sebagai salah satu dari tiga bentuk : (Keohane R. O., 1989)

1. Organisasi formal antara pemerintah atau organisasi antar negara non pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus, organisasi ini bisa mengawasi aktivitas dan memberikan respon terhadap aktivitas tersebut. Organisasi ini dibentuk oleh negara-negara.

2. Rezim Internasional

Rejim adalah insitusi yang memiliki peraturan eksplisit yang disetujui oleh negara-negara. Peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan beberapa isuisu hubungan intrnasional. Sebagai contoh, rejim IMF yang dibentuk di Bretton Woods pada tahun 1944, serta rejim Hukum kelautan yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 1970-an.

3. Konvensi

Dalam teori sosial dan filosofi, konvensi adalah institusi informal yang memiliki peraturan dan kesepakatan yang implisit yang membentuk

harapan dari para aktor-aktor yang terlibat. Konvensi memungkinkan aktor-aktor tersebut untuk memahami aktor yang lain tanpa adanya peraturan yang eksplisit, guna mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka. Sebagai contoh, prinsip kekebalan (*immunity*) diplomasi tradisional merupakan sebuah konvensi sebelum dikodifikasi dalam dua perjanjian internasional pada tahun 1960an. Institusi internasional memiliki beberapa peran penting. Robert Keohane menyatakan bahwa Peran institusi adalah

- a. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi.
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri oleh karena itu kemampuannya membuat komitmen yang dapat dipercaya berada di urutan pertama.
- c. Memperkuat harapan (level ekspekasi) yang muncul tentang kesolidan dari kesepaktan internasional

Neoliberalisme institutional tidak menyatakan bahwa persetujuan internasional dapat dibuat atau dipertahankan dengan mudah, justru sebaliknya. Klaim yang dikemukakan oleh neoliberalis adalah bahwa kemampuan negara untuk berkomunikasi dan bekerjasama tergantung pada institusi yang dibentuk. Bagi neoliberalis negara merupakan pusat intepretasi dari politik internasional, sama seperti realis. Tetapi bagi neoliberalis baik aturan formal maupun informal memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku negara.

Perspektif neoliberalisme institutional dapat dikatakan relevan pada sistem internasional jika memenuhi dua kondisi. Pertama, para aktornya harus mempunyai kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan, hal ini berarti bahwa para actor tersebut harus memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang mereka lakukan. Kondisi kedua terhadap relevansi dari pendekatan institusional adalah jenis-jenis dari tingkat institusionalisasi yang memberikan pengaruh substansial terhadap tingkah laku negara.

Tingkat institusionalisasi sebuah lembaga dapat diukur dengan menggunakan tiga dimensi, sebagai berikut :

- a. Kebersamaan (*commonality*) : derajat dimana harapan-harapan terhadap perilaku dan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana menginterpretasikan tindakan dibagi bersama oleh partisipasi dalam sistem tersebut.
- b. Kekhususan (*specificity*): derajat dimana harapan-harapan ini jelas khusus dalam bentuk aturan-aturan.
- c. Otonom (*autonomy*): perluasan dimana institusi dapat mengubah aturannya sendiri daripada bergantung pada badan-badan dan agen-agen asing (negara) untuk melakukan hal tersebut. (Suswanto, 2009)

#### **D. Hipotesis**

Bergabungnya Kazakhstan kedalam *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) memberikan dampak dalam hal-hal berikut :

1. Ekonomi Kazakhstan mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan Indikator berupa peningkatan Pendapatan Nasional, Pendapatan Perkapita, Tenaga Kerja dan Pengangguran, dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan Kazakhstan baik dalam negeri maupun kawasan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dampak Shanghai Cooperation Organization (SCO) Dalam pertumbuhan ekonomi Kazakhstan pada Tahun 2008-2017
2. Untuk mengetahui dampak Shanghai Cooperation Organization (SCO) Dalam Stabilitas Politik dan Keamanan Kazakhstan pada Tahun 2008-2017

## **F. Batasan dan Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup waktu dan jangkauan penelitian yang menjadi objek penulis, serta lokasi itu sendiri guna menambah materi ataupun sumber, baik yang sifatnya informatif maupun fakta dilapangan. Adapun jangkauan waktu penelitian ini dibatasi tahun 2008-2017. Tahun ini dipilih sebagai batasan penelitian karena pada periode tersebut terlihat perubahan yang signifikan dalam struktur ekonomi dan politik Kazakhstan.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan informasi mengenai gambaran umum penulisan yang penulis peroleh dengan menggunakan teknik *Library Research* dengan memanfaatkan data-data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik sekunder yang berupa surat kabar, artikel-artikel ilmiah, skripsi terdahulu serta situs internet serta sumber-sumber valid yang relevan bagi penulis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat yang mutlak untuk kaidah penulisan yang ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan akan bagaimana cara menyajikan hasil penelitian tersebut. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini yakni sebagai berikut :

**Pada Bab I** penulis mengisi dengan bagian pendahuluan, yang melingkupi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa,

Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Pada Bab II**, penulis mengisi bagian ini dengan membahas tentang Keadaan Ekonomi dan politik Kazakhstan sebelum bergabung dengan SCO. Periode sebelum bergabung mengacu dari tahun 1991 tepat saat Kazakhstan merdeka sampai dengan tahun 2000, 1 tahun sebelum Kazakhstan bergabung dengan SCO. Pada Bab ini terdiri dari dua sub judul. Pertama, Akan dimulai dengan pembahasan mengenai dinamika politik dalam negeri kazakhstan. Kedua, keadaan ekonomi kazakhstan pasca merdeka periode 1991-2000.

**Pada Bab III**, penulis mengisi bagian ini dengan dua sub Bab, pertama mengenai deskripsi *Shanghai Cooperation Organization (SCO)* sebagai organisasi internasional yang terdiri dari sub judul latar belakang pembentukan SCO, negara-negara anggota, tujuan dan prinsip SCO, struktur organisasi, peranan SCO. Sub Bab Kedua mengenai Hubungan Kazakhstan dengan SCO yang terdiri dari sub judul keanggotaan Kazakhstan dengan SCO dan Kepentingan Kazakhstan dalam SCO.

**Pada Bab IV**, berisikan pembahasan secara tuntas tentang dampak SCO Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik Kazakstan, yang berisi analisis hasil dari hubungan bergabungnya Kazakhstan ke dalam SCO dan dampaknya bagi ekonomi dan politik Kazakhstan.

**Pada Bab V** ditutup dengan kesimpulan dari skripsi ini secara singkat dan padat. Bab ini juga berisi saran penulis yang ditujukan sebagai acuan bagi penulis lain.